

ABSTRAK

PERDA SYARIAH DALAM HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA (Studi Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat)

Oleh

SINTA SEPTIANA

Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui kesesuaian penerapan Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/ Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat terhadap UUD Tahun 1945. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalisasi syariat Islam pada Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari kesesuaiannya terhadap UUD Tahun 1945, dianggap tidak sesuai/ bertentangan. Hal ini dikarenakan adanya pemaksaan pelaksanaan kewajiban umat Islam dalam berpakaian muslim/muslimah, dan pemberlakuan Perda tersebut menjadikan umat agama lain juga terpaksa memakai pakaian muslim/ muslimah. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan hak dalam kebebasan beragama, dan hak untuk tidak didiskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD Tahun 1945.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pakaian Muslim/Muslimah, UUD Tahun 1945

ABSTRACT

LOCAL REGULATION OF SHARIA IN STATE RELATIONS AND RELIGIOUS

**(Study local regulation number 7 year 2007 about muslim/ muslimah dress
for students, college students and employees in west pasaman)**

By

SINTA SEPTIANA

The purpose of this research was to determine the suitability of the application of local regulation number 7 year 2007 about muslim/ muslimah dress for students, college students and employees in west pasaman according to the Constitution of 1945. This type of research is normative, using statute approach, case approach and historical approach. The data was collected by means of literature study. The results for research showed that the formalization of Islamic sharia in local regulation number 7 year 2007 about muslim/ muslimah dress for students, college students and employees in west pasaman seen from compliance with the Constitution of 194, is considered incompatible/ contradictory. This is due to the imposition of the implementation of the obligations of muslims dressed in muslim/ muslimah, and enforcement of these local regulations makes believers of other religions are also forced to wear muslim/ muslimah dress.so that it's contrary to the right to freedom of religion, and the right not to be discriminated against as guaranteed by the Constitution of 1945.

Keywords :Local Regulation, Muslim/ Muslimah Dress, Constitution in 1945